



7. Urusan Perumahan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman
 - a) Pembangunan dan rehabilitasi kantor dinas.
 - b) Pembangunan dan rehabilitasi kantor kecamatan.
 - c) Rehabilitasi rumah dinas pejabat.
 - d) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan.
 - e) Pembangunan dan rehabilitasi pasar.
 - f) Pembangunan obyek wisata.
 - g) Penataan halaman stadion.
 - h) Pembangunan jalan dan jembatan desa.
 - i) Penyediaan PSD rusunawa.
 - j) Pengelolaan rusunawa.
 - k) Penyediaan air bersih dan sanitasi.
 - l) Penyediaan saluran air limbah.
 - m) Pembinaan teknis bangunan.
 - n) Pembangunan gedung laundry RSUD.
 - o) Pembangunan drainase tersier.
 - p) Penunjang bantuan stimulan rumah swadaya
 - q) Pemasangan lampu stadion
- 2) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan fasilitasi pemugaran rumah KK miskin
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan kegiatan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MP

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perumahan adalah sebagai berikut:



- 1) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman
 - a) Pembangunan dan rehabilitasi kantor dinas sebanyak 13 paket yaitu Kantor BAPPEDA, Gedung BLK, Gedung Peradilan Anak, Kantor P3BA, Ruang Seksi Sarpras P3BA, Kantor Catatan Sipil, Ruang pelayanan IMB, Talud Dinas P2KPM, Halaman BKD, kantin Sekda, Bidang Pariwisata, tempat parkir Dinas Pendidikan, dan kamar mandi Aula BAPPEDA.
 - b) Pembangunan dan rehabilitasi kantor kecamatan sebanyak 5 paket yaitu Kantor Kecamatan Godean, Kantor Kecamatan Moyudan, Kantor Kecamatan Depok, rumah dinas Camat Ngemplak dan pembongkaran rumah dinas Camat Sleman.
 - c) Rehabilitasi rumah dinas pejabat sebanyak 3 paket, yaitu rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, dan mushola rumah dinas pejabat.
 - d) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan sebanyak 17 paket yaitu gedung TK PKK, SD Gemawang, pagar SMP 1 Sleman, ruang klas SMA 1 Sleman, ruang klas SMP 1 Minggir, ruang klas SMP 1 Seyegan, laboratorium SMP 4 Gamping, ruang klas SMP 1 Cangkringan, pagar SMA 1 Cangkringan, laboratorium THP SMK 1 Cangkringan, ruang klas SMA 1 Turi, TPA Dharma Wanita, pagar SD Gemawang, penyempurnaan TK PKK, Mushola dan doorlop TK SD model.
 - e) Rehabilitasi pasar sebanyak 5 paket, terdiri dari Pasar Balangan, Pasar Pakem, Pasar Sleman, Pasar Sambilegi dan pembangunan pos keamanan Pasar Hewan Ambarketawang Gamping.
 - f) Pembangunan obyek wisata camping ground Cangkringan dan gardu pandang Boyong Pakem.
 - g) Pengaspalan keliling dan penataan halaman parkir stadion.
 - h) Pembangunan jalan seluas 21.143 m² dan jembatan jalan akses MGM.



- i) Pembangunan prasarana dasar rusunawa, terdiri dari talud sepanjang 450 m, penyiapan lahan 2 lokasi, penyambungan listrik PLN 4 lokasi, jaringan air bersih 2 lokasi, pemasangan lampu taman 15 unit, sumur resapan 64 unit, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1 unit dan penyusunan dokumen UKL-UPL.
 - j) Pengelolaan rusunawa Gemawang, Sinduadi, Mlati 4 unit.
 - k) Pembangunan jaringan air bersih sepanjang 11.433 m, jaringan air limbah 5.000 m dan pengadaan pipa dan water meter untuk masyarakat 1 paket.
 - l) Pembangunan saluran air limbah sepanjang 2.354 m.
 - m) Pembinaan teknis bangunan sebanyak 60 pemohon.
 - n) Pembangunan gedung laundry RSUD 1 paket.
 - o) Pembangunan drainase tersier UNY sepanjang 650 m.
 - p) Fasilitas bantuan stimulan rumah swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 100 rumah.
- 2) Program Penanggulangan Kemiskinan terealisasi fasilitasi pemugaran rumah KK miskin sebanyak 17 rumah dan bantuan semen untuk pemugaran rumah sebanyak 14.200 zak.
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa terealisasi fasilitasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MP sebanyak 15 kecamatan dan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas 2 desa (Margokaton dan Margoagung) Seyegan.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan perumahan rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 68,62% dan keluaran kegiatan sebesar 98,65% yang meliputi 3 program dan 19 kegiatan.

Program dan kegiatan urusan perumahan sebagian besar tercapai secara optimal didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Kegiatan yang tidak terealisasi adalah pemasangan lampu stadion karena dua kali gagal lelang akibat tidak ada yang memenuhi ketentuan teknis.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan mampu mendukung penyediaan sarana dan prasarana perumahan dengan dibangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 4 *twin block* beserta prasarana dasarnya di Dusun Dabag, Condongcatur, Depok.

Untuk mendukung penyediaan sarana perumahan yang layak bagi masyarakat miskin telah diberikan bantuan semen untuk pemugaran rumah sebanyak 14.450 zak, pembangunan rumah sebanyak 17 rumah dan stimulan perumahan swadaya 100 rumah.

Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat terutama di tingkat kecamatan telah dibangun dan direhabilitasi kantor Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan. Sampai dengan tahun 2009 kantor kecamatan yang memenuhi standar sebanyak 4 kecamatan.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Sleman apabila dihitung dari jumlah kepala keluarga yang ada sebanyak 255.555 unit. Jumlah rumah yang ada sebanyak 246.730 unit (hasil survey Pemerintah Provinsi DIY mengenai jumlah bangunan), sehingga kekurangan rumah tinggal sebanyak 8,825 unit. Sebagian besar kepala keluarga yang belum memiliki rumah tinggal adalah masyarakat yang kurang mampu. Solusi yang ditempuh adalah pengembangan rumah susun dengan memanfaatkan dana APBN.

- 2) Masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 16.967 unit terutama pada masyarakat kurang mampu atau miskin. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas bangunan dengan cara memberikan bantuan dan fasilitasi pemugaran rumah melalui swadaya masyarakat.
- 3) Sarana dan prasarana lingkungan permukiman berupa jalan poros desa sepanjang 2.046,5 km (kondisi beraspal: 760,851 km, *conblock*: 105,2 km, *corblock*: 156,4 km, makadam: 147,9 km, tanah: 876,37 km) dan drainase sepanjang 252.447 m (kondisi drainase terbuka: 55.462 m, tertutup: 104.783 m, tanah: 92.202 m) masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Solusi yang dilakukan adalah dengan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perumahan dengan skala prioritas yang ketat, mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan pemberian stimulan swadaya masyarakat.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - a) Fasilitasi dan evaluasi olah raga karyawan dan masyarakat.
 - b) Pembinaan Klub Olah Raga Pelajar (KOP) di kecamatan.
- 2) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga dengan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan Kejuaraan Tingkat Kabupaten (Kejurkab)
- 3) Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Generasi Muda
 - a) Pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna
 - b) Fasilitasi kegiatan pemuda dan remaja
 - c) Kegiatan dan pembinaan Kepemimpinan bagi pemuda
 - d) Pembinaan kelompok anti narkoba
 - e) Lomba baris berbaris tata upacara bendera
 - f) Pemilihan dan pelatihan Paskibraka
 - g) Pembinaan generasi muda

- 4) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah dengan kegiatan penyusunan profil pemuda dan olah raga

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pendidikan, pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan Olahraga dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - a) Koordinasi dan pengiriman peserta porseni ponpes sebanyak 3 kali, koordinasi olah raga karyawan dan masyarakat dan Tri Lomba Juang sebanyak 4 kegiatan.
 - b) Pembinaan Klub Olah Raga Pelajar (KOP) di 16 Kecamatan, sebanyak 17 klub (6 klub sepak bola, 6 klub cabang bola voli, 5 klub cabang tenis meja).
- 2) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga terealisasi fasilitasi POPNAS dan Kejurkab, terlaksananya seleksi dan pembinaan POPDA untuk 9 cabang olah raga
- 3) Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Generasi Muda
 - a) Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor, Karang Taruna dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) 3 kali; pelatihan organisasi dan manajemen bagi anggota Karang Taruna sebanyak 30 orang; bantuan usaha pemberdayaan bagi 40 Karang Taruna Desa; kemah bhakti Karang Taruna peduli lingkungan 1 kali di Kecamatan Seyegan; (Forum Komunikasi Karang Taruna) FKKT Kabupaten sleman 2 kali.
 - b) Koordinasi dan monitoring kegiatan pemuda dan remaja sebanyak 3 kali ; sarasehan dan dialog pemuda sebanyak 1 kali.
 - c) Kajian manajemen dan kepemimpinan pemuda sebanyak 20 buku, koordinasi, monitoring dan evaluasi manajemen dan kepemimpinan pemuda, sebanyak 4 kali.
 - d) Pembinaan kelompok narkoba dan sweeping siswa pada jam sekolah sebanyak 20 kelompok.

- e) Lomba baris berbaris sebanyak 60 pleton inti (tonti) dan lomba tata upacara di 40 sekolah.
 - f) Pemilihan 200 orang Paskibraka, pelatihan bagi 100 orang calon paskibraka ke tingkat propinsi dan terkirimnya 4 orang calon paskibraka tingkat Propinsi.
 - g) Pembinaan budi pekerti pemuda sebanyak 85 orang, kemah bakti sebanyak 60 regu, pembinaan organisasi kepemudaan 50 orang, dan sosialisasi kepemimpinan pemuda terhadap 50 orang.
- 4) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah terealisasi buku profil pemuda dan olahraga sebanyak 10 buku.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga, rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 94,66% dan keluaran kegiatan sebesar 100% yang meliputi 4 program dan 11 kegiatan.

Program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga sebagian besar tercapai secara optimal didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Berbagai program dan kegiatan di atas mampu mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga meningkat setiap tahun. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana olahraga yang merata di seluruh wilayah. Beberapa sarana olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Sleman memiliki standar nasional maupun internasional misalnya Stadion Sepakbola Maguwoharjo, Stadion UNY dan GOR UNY.

Prestasi yang dicapai Kabupaten Sleman dalam urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2009 antara lain Juara III Olimpiade Olahraga Siswa nasional SD cabang Renang Putri atas nama Anancy Reza Ngarbingan dari SDN Gentan Ngaglik, Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Karate Putra atas nama Willi Adhimas Rahmawan dari SD N Kenaran 2 Prambanan, Juara III Olimpiade



Olahraga Siswa Nasional SD cabang Karate Putri atas nama Arrindha Shinta Maharani dari SD Muhammadiyah Sleman, Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Tenis Putri atas nama Ayu Maharani Gempita Swatantri dari SD N Jatisawit Gamping, dan Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Catur Perorangan Putra atas nama Awang Putra Sembada dari SD N Gendengan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2009 antara lain :

- 1) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Upaya yang telah ditempuh adalah meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitasi kegiatan kepemudaan.
- 2) Masih kurangnya penghargaan terhadap prestador. Upaya yang dilakukan dengan memberikan *reward* kepada prestador .

9. Urusan Penanaman Modal

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a) Koordinasi penanaman modal tingkat kabupaten, provinsi dan pusat
 - b) Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - c) Pengelolaan dokumen penanaman modal perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
 - d) Identifikasi/penyusunan profil potensi investasi
 - e) Pembuatan materi promosi investasi
 - f) Indovest 2009 di Jakarta
 - g) Indonesia Today 2009 di Singapura
 - h) Invesda Expo 2009 di Yogyakarta
 - i) Investor Gathering di Jakarta



- j) Pengiriman misi investasi
- k) Forum komunikasi investasi
- l) Promosi investasi tingkat internasional 2009

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a) Koordinasi penanaman modal tingkat kabupaten 8 kali, tingkat provinsi 11 kali, dan tingkat pusat 7 kali
 - b) Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap 68 PMA/PMDN
 - c) Pengelolaan dokumen penanaman modal perusahaan PMA dan PMDN sebanyak 72 dokumen
 - d) Identifikasi/penyusunan 1 buah profil potensi investasi
 - e) Pembuatan materi promosi investasi Kabupaten Sleman sebanyak 1.000 buku
 - f) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Indovest 2009 pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2009 bertempat di Jakarta Convention Center Jakarta
 - g) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Indonesia Today 2009 pada tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2009 bertempat di Singapura
 - h) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Invesda Expo 2009 pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 2009 bertempat di Jogja Expo Center Yogyakarta
 - i) Investor gathering di Jakarta pada tanggal 25 November 2009
 - j) Pengiriman misi investasi ke Jakarta 5 kali dan ke Semarang 1 kali
 - k) Pelaksanaan forum komunikasi investasi 1 kali
 - l) Keikutsertaan Kabupaten Sleman dalam promosi investasi tingkat internasional di Den Haag Belanda

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan penanaman modal rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 88,78% dan untuk keluaran kegiatan mencapai 133,08% yang meliputi 1 program dan 12 kegiatan.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir antara tahun 2007 – 2009, baik investasi PMA maupun PMDN cenderung mengalami penurunan dalam hal capaian jumlah unit usaha maupun nilai investasi dari PMA dan PMDN. Sedangkan untuk penanaman modal Non PMA-PMDN dari 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan naik, baik dari jumlah unit usaha maupun nilai investasinya. Hal tersebut dikarenakan perubahan jumlah unit usaha PMA dan PMDN bukan semata-mata adanya penutupan usaha, tetapi juga dikarenakan adanya pengalihan status dari PMA dan PMDN ke Non PMA-PMDN.

Pada tahun 2009 jumlah unit usaha PMA sebanyak 33 unit usaha dengan nilai investasi mencapai US\$148.233.330,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.107 orang. Untuk jumlah unit usaha PMDN pada tahun 2009 mencapai 31 unit usaha dengan nilai investasinya mencapai Rp321.546.544.000,00 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.065 orang.

Tabel 4.10. Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2005 – 2009

No	Uraian	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Unit Usaha					
	a. PMA	35	38	36	35	33
	b. PMDN	39	38	36	32	31
	c. Non PMA-PMDN	24.408	25.653	26.779	27.783	28.320*

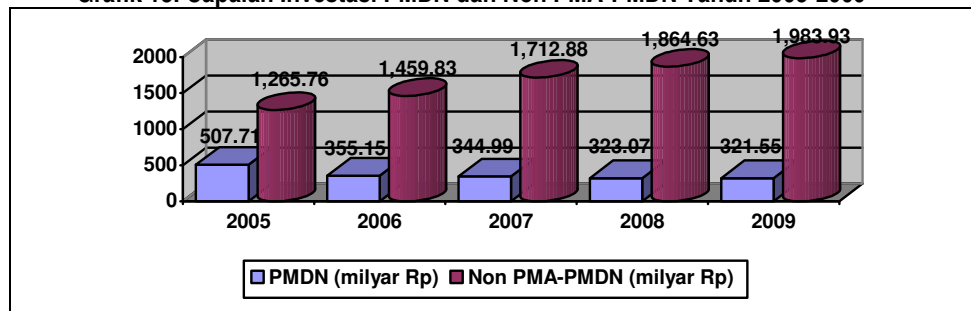
1	2	3	4	5	6	7
2.	Nilai Investasi					
	a. PMA (Juta US\$)	149,58	149,43	148,82	148,67	148,24
	b. PMDN (Milyar Rp)	507,71	355,15	344,99	323,07	321,55
	c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp)	1.265,76	1.459,83	1.712,88	1.864,63	1.983,93*
3.	Tenaga Kerja (org)					
	a. PMA	5.640	6.243	6.163	6.113	6.107
	b. PMDN	9.869	9.438	9.387	9.131	9.065
	c. Non PMA-PMDN	182.833	192.554	201.832	209.581	215.237*

Sumber: Dinas P2KPM, Kabupaten Sleman.

*) Data sementara

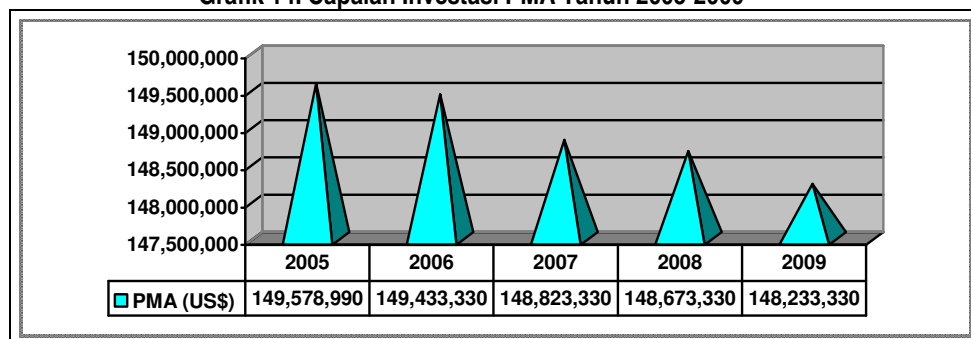
Pencapaian nilai investasi tahun 2009 untuk Investasi Non PMA-PMDN mencapai Rp1.983.930.216.000,00 dengan jumlah usaha sebanyak 28.320 unit usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 215.237 orang. Gambaran kondisi tersebut sebagaimana grafik berikut.

Grafik 13. Capaian Investasi PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2005-2009



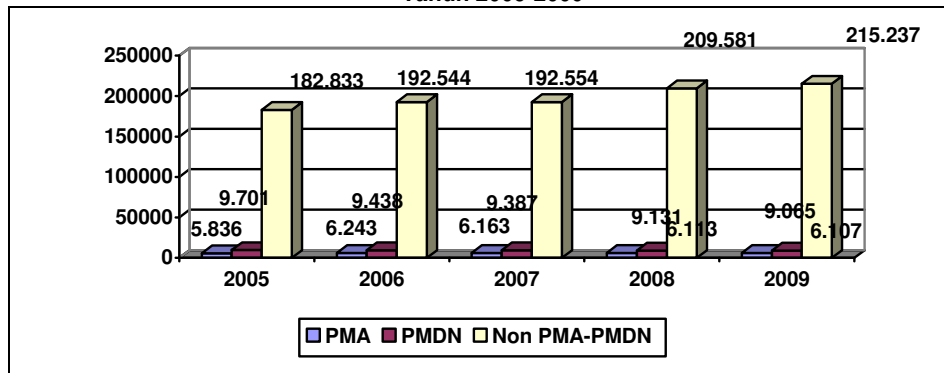
Sumber: Dinas P2KPM

Grafik 14. Capaian Investasi PMA Tahun 2005-2009



Sumber: Dinas P2KPM

**Grafik 15. Capaian Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dan Non PMA-PMDN
Tahun 2005-2009**



Sumber: Dinas P2KPM

c. Permasalahan dan Solusi

Terjadinya penurunan penanaman modal PMA dan PMDN dikarenakan adanya perusahaan (terutama perusahaan dari Amerika) yang mengalami kesulitan modal sebagai dampak krisis global dan adanya perusahaan yang pindah ke Jakarta untuk efisiensi tetapi produksi tetap dipasok dari Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan antara lain pemberian insentif/fasilitas dan promosi penanaman modal untuk meningkatkan penanaman modal Non PMA-PMDN.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan
 - a) Pembinaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KK Miskin
 - b) Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi KK miskin
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM dengan kegiatan diklat tentang jiwa kewirausahaan bagi UKM
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a) Evaluasi kinerja koperasi
 - b) Pembuatan aplikasi akuntan simpan pinjam bagi koperasi fungsional
 - c) Fasilitasi penyelesaian masalah koperasi



- d) Pembubaran koperasi beku
- e) Diklat perkoperasian
- f) Bimbingan manajemen bagi koperasi pasif
- 4) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM dengan kegiatan penerbitan badan hukum koperasi
- 5) Program Penyiapan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi
 - a) Penunangan dan monitoring penguatan modal koperasi dan UKM
 - b) Penunangan dan monitoring pensertifikatan tanah UMK
- 6) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah dengan kegiatan updating data base koperasi
- 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan penyebarluasan pedoman pengelolaan koperasi

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan terealisasi pembinaan dan pemberian bantuan alat produksi wajan dan milkcan bagi 120 KK miskin
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM terealisasi diklat jiwa kewirausahaan bagi 44 UKM
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a) Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) dan koperasi berprestasi kepada 50 koperasi
 - b) Pembuatan 1 paket aplikasi akuntansi simpan pinjam bagi koperasi konvensional
 - c) Fasilitasi penyelesaian masalah koperasi bagi 9 koperasi
 - d) Pembubaran 18 koperasi beku

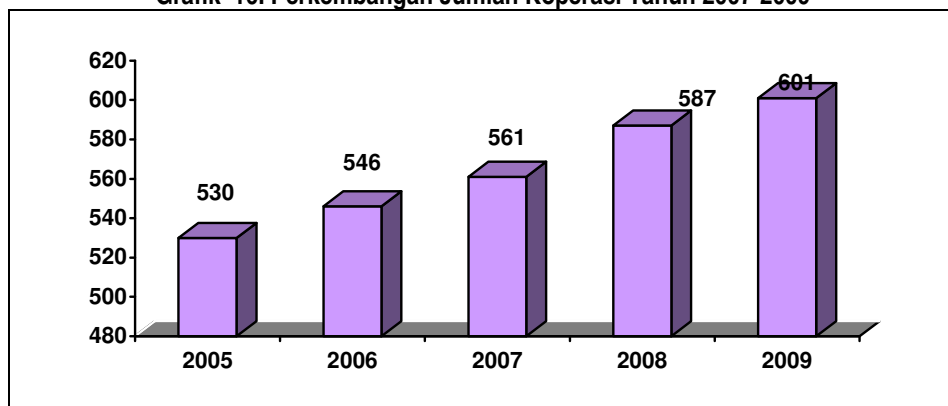
- e) Diklat perkoperasian bagi 20 orang pengurus dan 22 orang pengawas koperasi, *Total Motivation Training* bagi 22 peserta, bintek penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi 22 peserta, bintek pemeringkatan koperasi bagi 22 peserta, dan bintek kesehatan koperasi bagi 22 peserta
- f) Bimbingan manajemen bagi 20 koperasi pasif
- 4) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM terealisasi penyuluhan tentang tata cara mendirikan koperasi terhadap 37 koperasi, rapat anggota pendirian koperasi terhadap 18 koperasi, penelitian badan hukum koperasi terhadap 11 koperasi, serta pelantikan pengurus dan pengawas koperasi pada 14 koperasi
- 5) Program Penyiapan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi
 - a) Penyaluran kredit penguatan modal bagi 20 koperasi dan 10 PK, monitoring dan evaluasi penguatan modal koperasi dan UKM bagi 20 koperasi dan 20 PK
 - b) Pensertifikatan tanah bagi 100 bidang tanah UMK
- 6) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah terealisasi pendataan 561 koperasi
- 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa terealisasi pembuatan 100 eksemplar *leaflet*, 140 eksemplar buku pegangan pengurus, 140 eksemplar buku pegangan pengawas, 45 eksemplar pedoman SOP koperasi syariah, 110 eksemplar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, 200 eksemplar tata cara pendirian koperasi, dan 110 eksemplar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 98,96% dan keluaran kegiatan 103,15% yang meliputi 7 program dan 13 kegiatan.

Program dan kegiatan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah secara keseluruhan tercapai secara optimal didukung oleh kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana kerja serta kinerja aparat. Kendati demikian masih ada kegiatan yang tidak tercapai secara optimal yaitu pensertifikatan tanah UMK dari rencana 150 bidang terealisasi 100 bidang atau 66,67% sehingga masih ada 50 bidang belum tersertifikatkan yaitu 40 bidang dalam proses pengumuman dan 10 bidang dalam proses pengukuran. Hal tersebut disebabkan masyarakat lamban dalam melengkapi kekurangan dokumen pensertifikatan tanah.

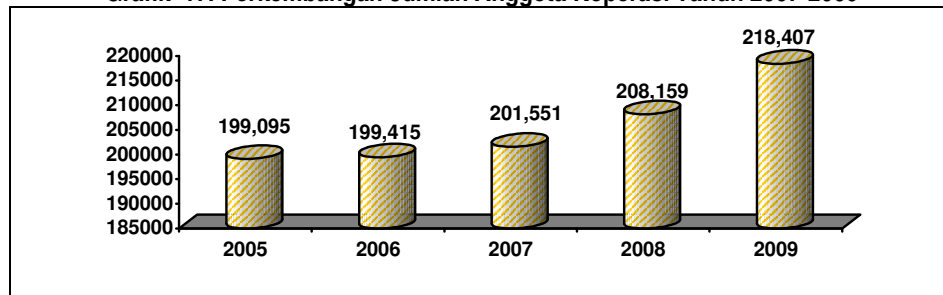
Pelaksanaan program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan jumlah lembaga, anggota dan volume usaha koperasi. Pertumbuhan jumlah koperasi pada tahun 2008 sebesar 587 unit menjadi 601 unit atau meningkat 2,33% pada tahun 2009. Perkembangan jumlah anggota koperasi juga mengalami kenaikan sebesar 428 orang atau 0,20% dari 208.407 orang pada tahun 2008 meningkat menjadi 218.835 orang pada tahun 2009. Perkembangan volume usaha mengalami kenaikan sebesar 27,71%, pada tahun 2008 sebesar Rp656.431.240,00 menjadi Rp671.888.372,00 pada tahun 2009.

Grafik 16. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2007-2009



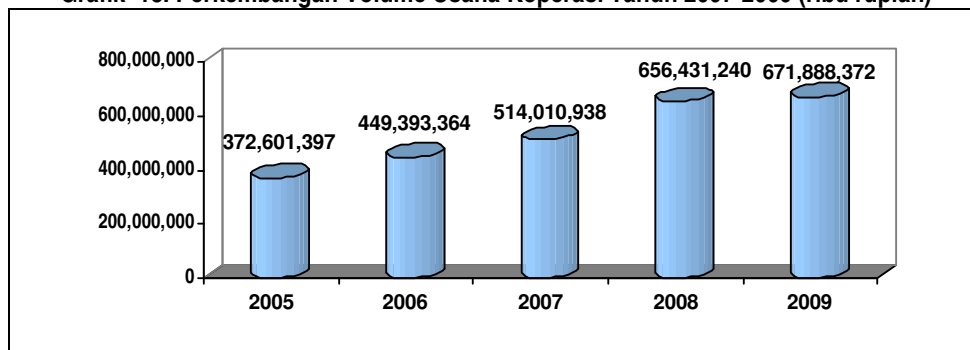
Sumber: Dinas P2KPM Sleman

Grafik 17. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2007-2009



Sumber: Dinas P2KPM Sleman

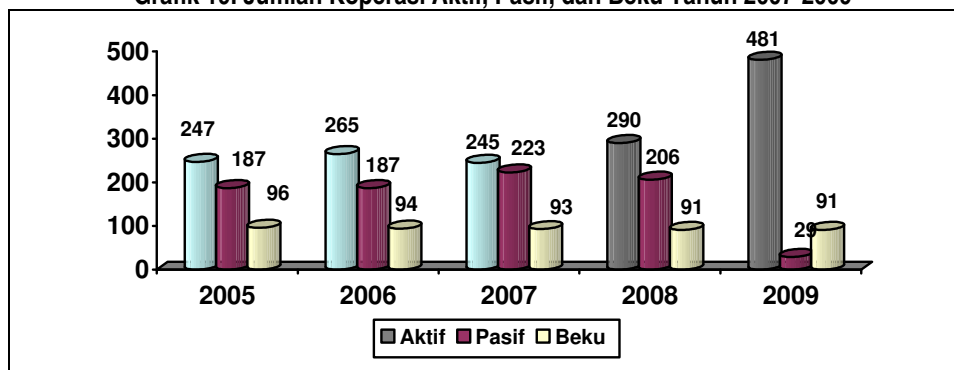
Grafik 18. Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2007-2009 (ribu rupiah)



Sumber: Dinas P2KPM Sleman

Tahun 2009 dari 601 koperasi terdapat koperasi aktif sebanyak 481 (80,03%), koperasi pasif 29 (4,83%), dan koperasi beku 91 (15,14%). Dibandingkan data tahun 2008 jumlah koperasi aktif di tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 39,71%, jumlah koperasi pasif turun 85,92% dan jumlah koperasi beku tetap.

Grafik 19. Jumlah Koperasi Aktif, Pasif, dan Beku Tahun 2007-2009



Sumber: Dinas P2KPM Sleman

c. Permasalahan dan Solusi

Masih terdapat 91 koperasi beku, namun regulasi tentang pembubaran koperasi belum ada dari Pemerintah Pusat. Solusi dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a) Fasilitasi petugas P4 dan pembinaan wawasan tentang tugas teknis pencatatan perkawinan
 - b) Penunjang pelayanan akta catatan sipil
 - c) Jemput bola akta kematian
- 2) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
 - a) Pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil
 - b) Pembinaan dan penunjang pelayanan administrasi kependudukan
 - c) Sosialisasi Perda dan Keputusan Bupati tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil
- 3) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan fasilitasi KK dan KTP bagi keluarga miskin
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan
 - b) Pengelolaan kepegawaian
 - c) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi
 - d) Penyediaan alat tulis kantor, barang, cetakan dan penggandaan
 - e) Koordinasi dan konsultasi
 - f) Fasilitasi rapat dan tamu
 - g) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - h) Penyediaan jasa kebersihan



- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana kerja
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan
- 7) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
 - c) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a) Fasilitas bagi petugas Petugas Pembantu Penyelenggara Perkawinan (P4) dan pembinaan wawasan tentang tugas teknis pencatatan perkawinan 40 orang.
 - b) Penunjang pelayanan akta catatan sipil terdiri dari : akta kelahiran rutin 10.068 lembar, akta kelahiran terlambat 16.793 lembar, akta perkawinan rutin 993 lembar, akta perkawinan terlambat 33 lembar, akta perceraian rutin 47 lembar, akta perceraian terlambat 17 lembar, akta kematian rutin 481 lembar, akta kematian terlambat 3.100 lembar, akta pengakuan dan pengesahan anak 7 lembar, akta pengangkatan anak rutin 11 lembar, akta pengangkatan anak terlambat 12 lembar, akta perubahan nama 22 lembar, petikan II kelahiran 264 lembar, petikan II perkawinan 14 lembar, surat-surat keterangan 14.899 lembar, blangko laporan 35.755 lembar, legalisasi akta catatan sipil 35.207 lembar.



-
- c) Jemput bola akta kematian 20 desa di 8 kecamatan, yaitu di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Tempel, Kecamatan Berbah, Kecamatan Turi, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Sleman.
 - 2) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
 - a) Penataan dan penjilidan 750 buku dokumen kependudukan dan catatan sipil.
 - b) Pembinaan dan penunjang pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari: KTP 210.728 lembar, KK (Kartu Keluarga) 101.931 lembar, KIPEM 4.200 lembar, Surat-surat Kependudukan 18.174 lembar, SKPPS 125 lembar, Surat Izin Menjadi Penduduk DIY 2.590 lembar, Surat Izin Menjadi Penduduk Luar DIY 6.793 lembar.
 - c) Sosialisasi Perda dan Keputusan Bupati tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil bagi 108 orang.
 - 3) Program Penanggulangan Kemiskinan terealisasi fasilitasi KK (Kartu Keluarga) bagi 2.839 KK keluarga miskin.
 - 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, 2.599 surat, 8 DPA, 100 boks arsip dan 12 kali laporan.
 - b) Pengelolaan kepegawaian 33 orang.
 - c) Jasa langganan listrik, telepon, air , dan surat kabar selama 12 bulan.
 - d) Pengadaan barang dan jasa kantor terdiri dari: KTP 240.000 lembar, KK 143.500 lembar, KIPEM 10.000 lembar, SKTT 300 lembar, SKPPS 300 lembar, SKPPT 300 lembar, Blangko Kutipan 29.700 lembar, Buku Register 435 lembar.
 - e) Koordinasi dan konsultasi ke Cirebon dan Tulungagung.
 - f) Fasilitasi rapat 8 kali.
 - g) Jasa administrasi keuangan 24 orang 12 bulan.

- h) Terlaksananya kebersihan kantor, pembelian peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan pembayaran jasa petugas kebersihan 1 orang.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana kerja, 1 unit laptop, 3 buah lemari.
 - b) Pemeliharaan 1 unit mobil, 6 unit sepeda motor, 6 unit komputer, dan 1 unit gedung.
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak direalisasikan.
- 7) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Laporan perencanaan kerja 10 dokumen, RKA 5 dokumen, DPPA 5 dokumen dan DPA 5 dokumen.
 - b) Laporan bulanan SKPD 84 dokumen, laporan tahunan SKPD 7 dokumen, LAKIP 7 dokumen, Berita Acara 10 dokumen dan laporan barang 4 kali.
 - c) Laporan keuangan bulanan 48 dokumen, laporan keuangan tahunan 4 dokumen, catatan atas laporan keuangan 4 dokumen.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan kependudukan rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 80,08% dan keluaran kegiatan 76,88% yang meliputi 7 program dan 21 kegiatan.

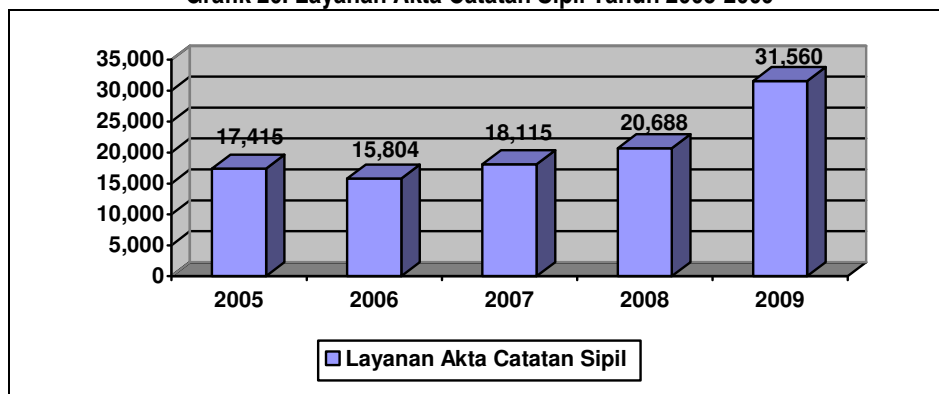
Sebagian besar pencapaian keluaran program kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2009 di Kabupaten Sleman mencapai 100%. Pelaksanaan program kegiatan relatif berjalan lancar, didukung oleh sarana dan prasarana kerja, kinerja aparat, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Walaupun ada dua kegiatan yang tingkat capaian keluarannya tidak mencapai 100% yaitu kegiatan

Pembinaan dan Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan tingkat capaian keluaran sebesar 86,10% karena banyaknya penduduk yang migrasi keluar daerah tetapi tidak melapor, yang berdampak pada dokumen kependudukan yang bersangkutan tidak diperpanjang. Hal inilah yang menyebabkan target retribusi tidak tercapai. Dan kegiatan Fasilitasi KK dan KTP Bagi Keluarga Miskin dengan tingkat capaian keluaran sebesar 24,69% karena proses pendataan dan distribusi yang dilakukan oleh pedukuhan dan desa tidak optimal.

Selain 2 kegiatan yang tidak dapat mencapai target keluaran 100% tersebut diatas, terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, karena tidak ada program diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansi.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan jumlah pencapaian dari tahun sebelumnya, dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil terutama dalam layanan akta catatan sipil yang meningkat sebesar 52,55% dari 20.688 orang pada tahun 2008 menjadi 31.560 orang di tahun 2009.

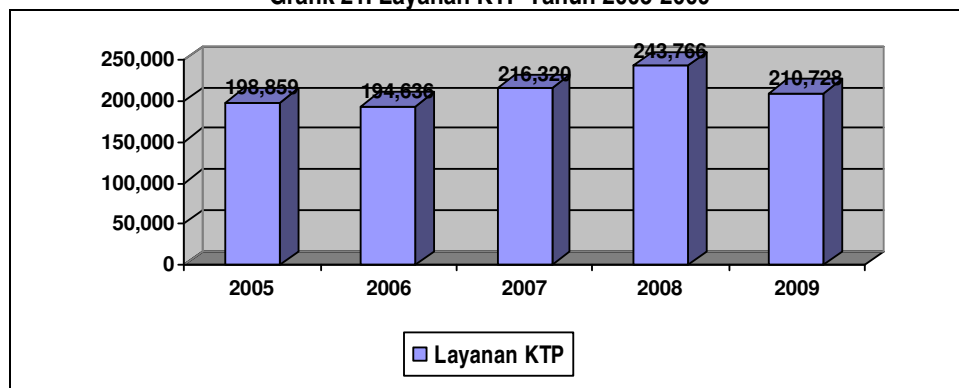
Grafik 20. Layanan Akta Catatan Sipil Tahun 2005-2009



Sumber : Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Keberhasilan ini juga ditunjang oleh kegiatan-kegiatan seperti adanya sosialisasi dan jemput bola akta kematian kepada masyarakat dan masyarakat sadar akan arti pentingnya memiliki identitas diri berupa akta-akta kependudukan dan catatan sipil. Walaupun terjadi sedikit penurunan layanan administrasi kependudukan khususnya layanan KTP menurun sebesar 13,55% dari 243.766 di tahun 2008 menjadi 210.728 di tahun 2009.

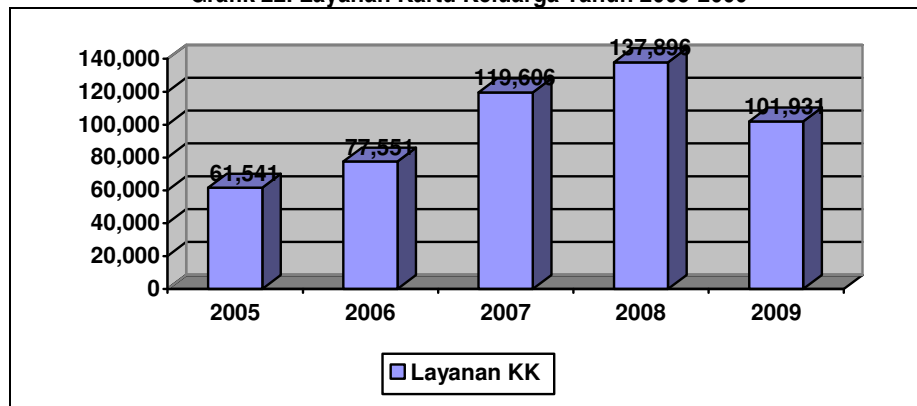
Grafik 21. Layanan KTP Tahun 2005-2009



Sumber : Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Layanan KK juga menurun sebesar 26,08% dari 137.896 KK di tahun 2008 menjadi 101.931 KK di tahun 2009 karena banyaknya penduduk yang migrasi keluar daerah tetapi tidak melapor, sehingga dokumen kependudukan yang bersangkutan tidak diperpanjang.

Grafik 22. Layanan Kartu Keluarga Tahun 2005-2009



Sumber : Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

c. Permasalahan dan Solusi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa dokumen kependudukan antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana. Hal ini menyebabkan berbagai pelayanan atas dokumen kependudukan semakin lama karena sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut, beberapa dokumen cukup ditandatangani oleh camat. Disamping pelayanan semakin lama, juga menyebabkan pelayanan menjadi relatif lebih mahal, karena ada biaya tambahan yang harus dianggarkan oleh pemerintah. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengatur kembali mekanisme dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pembinaan aparat pelaksana pendaftaran penduduk dan catatan sipil di tingkat desa secara berkelanjutan, sosialisasi peraturan perundang-undangan baik kepada petugas pelaksana maupun masyarakat

12. Urusan Ketenagakerjaan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a) Fasilitasi penyediaan kesempatan kerja
 - b) Pendampingan operasional padat karya
- 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
 - a) Pemeriksaan dan pengujian alat dan tempat kerja di perusahaan.
 - b) Pengawasan, pembinaan norma kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta identifikasi wajib lapor ketenagakerjaan.
 - c) Fasilitasi jaminan kesehatan sosial tenaga kerja bagi tenaga kontrak dan honorer.

- d) Fasilitas penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- e) Pendataan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- f) Mediasi penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Industrial (PHI)/ Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dan bimbingan teknis.
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dengan kegiatan fasilitasi Forum ketenagakerjaan Kabupaten Sleman
- 4) Program Peningkatan Kualitas Calon Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja
 - a) Pembinaan LPK dan perluasan jaringan informasi bursa kerja
 - b) Pelatihan institusional, non institusional, swadana, dan difabel
 - c) Monitoring lulusan dan promosi pelatihan
 - d) Kerjasama pelatihan di perusahaan
 - e) Pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK)
 - f) Uji kompetensi dan sertifikasi bidang otomotif, listrik, telematika, dan menjahit
 - g) Sosialisasi standarisasi dan sertifikasi
 - h) Penyusunan modul *Competence Based Training* (CBT)
 - i) Pengiriman pemagangan instruktur di perusahaan
- 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a) Pelayanan penempatan tenaga kerja program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 398 orang dan program Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 4.799 orang, pembinaan dan penempatan

- calon TKI ke luar negeri 200 orang, pemberian dana pinjaman TKI ke luar negeri 19 orang, pembinaan bagi TKM 20 orang, bantuan modal usaha bagi TKM 20 orang
- b) Pelaksanaan kegiatan padat karya produktif di 26 desa.
- 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
- a) Pemeriksaan peralatan dan tempat kerja di 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 1 kali, dan pembelian alat penyalur petir dan listrik.
- b) Pengawasan kondisi norma kerja dan norma K3 di 75 perusahaan, upacara pembukaan bulan K3 dan demonstrasi penanggulangan kebakaran 1 kali, rapat koordinasi panitia pembinaan K3 70 orang, identifikasi 50 perusahaan baru yang belum melaksanakan wajib lapor .
- c) Pembayaran jaminan kesehatan sosial bagi 380 tenaga kontrak dan honorer Pemerintah Kabupaten Sleman.
- d) Pembinaan dan penyusunan PP/PKB/PKWT di 60 perusahaan, pembinaan Lembaga Ketrampilan Swasta (LKS) Bipartit di 20 perusahaan, pembinaan dan perizinan bagi perusahaan penyedia tenaga kerja di 10 perusahaan, verifikasi 20 Serikat Pekerja/Serikat Buruh, studi banding bagi 12 orang anggota LKS Tripartit dan mediator disnaker dan perusahaan, deteksi dini untuk pencegahan PHI di 28 perusahaan, 4 buah rekomendasi penyelesaian HI.
- e) Pendataan KHL pada 9 sektor usaha 1 kali, survey KHL ke 3 pasar 1 kali.
- f) Pelaksanaan mediasi penyelesaian 45 kasus PHI/PHK , pembimbingan pengajuan gugatan ke pengadilan untuk 180 orang dari 60 perusahaan , temu konsultasi asosiasi mediator HI 4 kali.
- 3) Program Peningkatan Informasi Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja
- Fasilitasi forum ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman sebanyak 4 kali pertemuan.



-
- 4) Program Peningkatan Kualitas Calon Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja
 - a) Pembinaan pengurus LPK dan BKK di 45 lembaga, sosialisasi BKK sebanyak 45 angkatan, dan forum komunikasi LPK dan BKK sebanyak 45 angkatan.
 - b) Pelatihan kerja institusional sub kejuruan bagi 112 orang, pelatihan kerja non institusional sub kejuruan bagi 324 orang, pelatihan kerja swadana untuk kejuruan bagi 125 orang, dan pelatihan kerja difabel bagi 40 orang.
 - c) Monitoring lulusan dan promosi pelatihan 609 orang di 17 kecamatan, penyuluhan ke SLTA dan lembaga/organisasi 5 kali 20 lembaga.
 - d) Pemagangan atau praktek kerja bagi 25 orang tenaga kerja.
 - e) Peningkatan informasi lapangan kerja dan penempatan lulusan BLK sebanyak 145 orang.
 - f) Uji kompetensi pelatihan kerja (*automotive*, listrik, telematika dan menjahit) bagi 80 orang, sertifikasi pelatihan 974 orang peserta yang lulus.
 - g) Pembinaan LPK swasta sebanyak 25 LPK
 - h) Penyusunan modul CBT kejuruan otomotif, listrik, tekme, aneka kejuruan, pertanian, tata niaga, dan bangunan.
 - i) Pemagangan 10 orang instruktur / pelatih di perusahaan .
 - 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Layanan surat-menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan.
 - b) Pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak 12 bulan.
 - c) Pembayaran bendahara dan pengurus barang 12 bulan.
 - d) Pengadaan barang cetakan, ATK, alat listrik dan elektronik, dan penggandaan 12 bulan.
 - e) Pelayanan kebersihan kantor 12 bulan.



- f) Rapat dinas dan penerimaan tamu 12 bulan.
- g) Koordinasi dan konsultasi 12 bulan.
- h) Tertib administrasi kepegawaian dan penilaian angka kredit 12 bulan.
- i) Fasilitasi jasa keamanan 12 bulan.
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi pemeliharaan kendaraan roda dua 12 unit, kendaraan roda empat 6 unit, dan gedung 17 unit
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Dokumen RKA, DPA, Renja SKPD, dan Program Kerja SKPD masing-masing 1 dokumen.
 - b) Laporan Bulanan SKPD 12 buku, laporan tahunan SKPD 1 buku, dan LAKIP 1 buku.
 - c) Laporan keuangan dan laporan realisasi fisik dan keuangan 12 bulan.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 88,99% dan keluaran kegiatan 99,61% yang meliputi 7 program dan 34 kegiatan.

Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2009 mampu mendukung penyerapan tenaga kerja 90,27% dari total angkatan kerja 468.024 orang dengan peningkatan jumlah orang yang bekerja sebanyak 41.710 orang dari 380.780 orang tahun 2008 menjadi 422.490 orang pada tahun 2009. Selain itu, program dan kegiatan ini mampu mendukung upaya penurunan jumlah orang yang tidak bekerja (penganggur) dari 11,70% menjadi 10,77 %.

Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar (AKAL, AKAD, dan AKAN) dengan

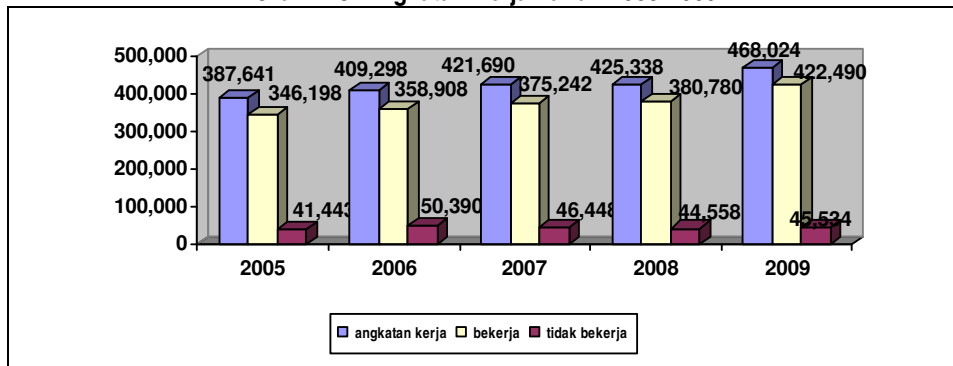
dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja terdaftar dari 4.074 pada tahun 2008 menjadi 5.335 orang pada tahun 2009.

Tabel 4.11. Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	AKL	3.350	3.796	3.568	3.344	4.799
2	AKAD	1.094	579	355	602	398
3	AKAN	704	186	344	148	138
4	Jumlah	5.148	4.561	4.267	4.094	5.335

Sumber : Dinas Nakersos KB

Grafik 23. Angkatan Kerja Tahun 2005-2009



Sumber : Dinas Nakersos KB

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Terdapat kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja. Solusi yang dilakukan adalah dengan membuka akses informasi peluang kerja.
- 2) Terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja di perusahaan. Solusi yang ditempuh dengan pemeriksaan peralatan dan tempat kerja, pengawasan penerapan norma kerja dan norma K3, dan mengikutsertakan tenaga kerja sebagai peserta Jamsostek.
- 3) Masih rendahnya kualifikasi kemampuan dan daya saing calon tenaga kerja. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan tenaga kerja yang disesuaikan dengan permintaan pasar/ bursa kerja, serta pemagangan / kerja praktek di perusahaan.



13. Urusan Ketahanan Pangan

a. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- 1) Analisis kebijakan pengembangan pangan lokal
- 2) Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
- 3) Pemantauan kegiatan kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kecamatan Sleman
- 4) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Mlati
- 5) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Gamping
- 6) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Godean
- 7) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Moyudan
- 8) Pemberdayaan P3A di Kecamatan Minggir
- 9) Musyawarah pembangunan pelaku pertanian di Kecamatan Minggir
- 10) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Seyegan
- 11) Pembinaan petani dan kelompok tani di Kecamatan Tempel
- 12) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Tempel
- 13) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Turi
- 14) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Pakem
- 15) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Cangkringan
- 16) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan P3A di Kecamatan Ngemplak
- 17) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Kecamatan Ngemplak
- 18) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Ngaglik
- 19) Peningkatan ketersediaan pangan di Kecamatan Depok
- 20) Fasilitasi Pemberdayaan kelompok tani/P3A di Kecamatan Depok
- 21) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Berbah
- 22) Fasilitasi P3A di Kecamatan Prambanan
- 23) Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan
- 24) Pengawasan Mutu, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 25) Revitalisasi Lumbung Pangan
- 26) Dem Kentang Dataran Medium



27) Pendampingan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan

28) Pendampingan Peningkatan Ketahanan Pangan Peternakan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- 1) Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) terlaksana sebanyak 12 kali dan dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 10 dokumen.
- 2) Analisis kebijakan pengembangan pangan lokal, tersusun dokumen kajian pengembangan pangan lokal 1 dokumen.
- 3) Pemantauan kegiatan kelompok tani dan P3A di Kecamatan Sleman 2 kali mencakup 10 kelompok tani.
- 4) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Mlati 5 kali.
- 5) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Gamping 2 kali.
- 6) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Godean 2 kali.
- 7) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Moyudan 1 kali.
- 8) Pemberdayaan P3A di Kecamatan Minggir 2 kali.
- 9) Musyawarah pembangunan pelaku pertanian di Kecamatan Minggir 2 kali.
- 10) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Seyegan di 5 desa dengan P3A sebanyak 32 kelompok.
- 11) Pembinaan kelompok tani dan lumbung pangan di Kecamatan Tempel, masing-masing 3 kali.
- 12) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Tempel 2 kali.
- 13) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Turi 2 kali dan 1 buku data kelompok P3A.
- 14) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Pakem 4 kali.
- 15) Fasilitasi dan Pemberdayaan P3A di Kecamatan Cangkringan 4 kali.



- 16) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan P3A di Kecamatan Ngemplak 5 kali.
- 17) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan KTNA di Kecamatan Ngemplak 4 kali.
- 18) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Ngaglik 2 kali koordinasi.
- 19) Peningkatan ketersediaan pangan di Kecamatan Depok koordinasi 4 kali .
- 20) Fasilitasi Pemberdayaan kelompok tani/P3A di Kecamatan Kalasan koordinasi 4 kali .
- 21) Fasilitasi Pemberdayaan P3A di Kecamatan Berbah koordinasi 3 kali.
- 22) Fasilitasi P3A di Kecamatan Prambanan koordinasi 3 kali.
- 23) Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP), tersusun laporan tahunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 1 dokumen. Pemanfaatan data SKPG dapat mengidentifikasi daerah rawan pangan di Kabupaten Sleman sebanyak 12 kelompok (desa rawan pangan).
- 24) Pengembangan konsumsi pangan masyarakat sebanyak 3 kali; uji bahan pangan sebanyak 1 paket; apresiasi mutu dan keamanan pangan sebanyak 1 kali; pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan sebanyak 1 kali; pembinaan distribusi dan pengendalian harga pangan sebanyak 12 kali; pengembangan cadangan pangan sebanyak 10 kelompok dan apresiasi cadangan pangan sebanyak 1 kali.
- 25) Pendataan kelompok lumbung pangan di 17 kecamatan; kegiatan pembinaan kelompok lumbung pangan sebanyak 4 kali serta koordinasi evaluasi kinerja kelompok lumbung sebanyak 4 kali,
- 26) Dem Kentang Dataran Medium seluas 2 Ha wilayah Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem.

- 27) Magang bagi petugas dan pengurus kelompok ke desa mandiri pangan sebanyak 2 desa; kegiatan kampanye pangan 3 B (Beragam, Bergizi dan Berimbang) di sekolah sebanyak 3 kali dan kegiatan Intervensi daerah potensi rawan pangan 2 desa (Desa Sumberrejo, Tempel dan Desa Wukirharjo Prambanan).
- 28) Pengendalian penyakit hewan 1 paket; penerapan higiene sanitasi susu 1 paket dan fasilitasi administrasi kegiatan 1 paket.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan oleh 19 SKPD (Sekretariat Daerah; Dinas Pertanian dan Kehutanan serta 17 Kecamatan) rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 95,86% dan keluaran kegiatan 100% yang meliputi 1 program dan 28 kegiatan.

Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan berjalan optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja, peran serta masyarakat peduli pangan, pihak akademisi serta seluruh anggota dan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman.

Semua kegiatan pada program peningkatan ketahanan pangan mampu mencapai target capaian keluaran yang direncanakan senilai 100%. Tersusunnya 1 dokumen kajian kebijakan pengembangan pangan lokal menjadi salah satu bahan perumusan kebijakan pengembangan pangan lokal, sekaligus mendukung program panganekaragaman konsumsi pangan dan gizi.

Terlaksananya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan mendukung keterpaduan kegiatan peningkatan ketahanan pangan aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan serta aspek konsumsi pangan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait.

Semua kegiatan peningkatan ketahanan pangan berupa fasilitasi pemberdayaan kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD 17 kecamatan, mampu direalisasikan 100 % sesuai target keluaran baik cakupan volume kegiatan koordinasi, kegiatan musyawarah pembangunan pelaku pertanian, kegiatan pembinaan dan pemantauan maupun jumlah kelompok sasaran. Kegiatan koordinasi peningkatan ketersediaan pangan di Kecamatan Depok sebanyak 4 kali, mampu mendukung pencapaian target pemantauan ketersediaan pangan 80 %.

Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) terlaksana melalui terwujudnya 1 unit Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2009. Melalui analisis data SKPG pada gabungan indikator pertanian, indikator sosial ekonomi dan indikator kesehatan didapatkan informasi bahwa ke 17 kecamatan di Kabupaten Sleman termasuk peta hijau (artinya wilayah dengan resiko kerawanan pangan dan gizi ringan), sedangkan jumlah desa dengan kategori peta merah (resiko rawan pangan dan gizi tinggi) meliputi Desa Caturharjo, Desa Sumberrejo, Desa Mororejo, Desa Wukirharjo, Desa Wukirsari, Desa Sendangmulyo. Keenam desa dimaksud pada indikator pangan dan indikator kesehatan menunjukkan skor I artinya resiko ringan, namun dilihat dari indikator ekonomi menunjukkan skor 4 (jumlah KK Miskin > 40 % , resiko tinggi rawan pangan dan gizi). Dengan program pemberdayaan masyarakat serta penanganan daerah rawan pangan, mampu mengurangi jumlah desa dengan jumlah KK Miskin > 40%. Tahun 2008 masih menyisakan 7 desa , berkurang menjadi 6 desa dengan jumlah KK Miskin > 40 %.

Pengembangan kinerja lumbung pangan ditunjukkan dengan peningkatan 1 lumbung pangan dari kategori sederhana menjadi maju pada tahun 2009. Data lumbung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.12. Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Lumbung Pangan			Jumlah
		Sederhana	Maju	Moderen	
1	Gamping	2	1	-	3
2	Godean	1	-	-	1
3	Minggir	5	-	-	5
4	Moyudan	4	-	-	4
5	Seyegan	3	-	-	3
6	Mlati	2	-	-	2
7	Tempel	11	-	-	11
8	Sleman	10	-	-	10
9	Ngaglik	8	-	-	8
10	Turi	-	-	-	-
11	Pakem	4	-	-	4
12	Cangkringan	5	-	-	5
13	Ngemplak	11	-	-	11
14	Depok	-	-	-	-
15	Kalasan	-	-	-	-
16	Berbah	3	-	-	3
17	Prambanan	1	-	-	1
	Jumlah	71	-	-	71

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab.Sleman

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan antara lain dapat dilihat dari penerimaan penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional Tahun 2009 sebanyak 8 kategori (terbanyak antar kabupaten/ kota se Indonesia) berdasarkan SK Mentan Nomor: 3856/Kpts/KP.450/11/2009 dan SK Mentan Nomor: 3857/Kpts/KP.450/11/2009.

Jumlah Penerima penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional tahun 2009 mengalami peningkatan sejumlah 2 kategori dibandingkan dengan tahun 2008. Adapun data prestator penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

1) Budi Santosa, SP.

Kategori Petugas pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura.

2) H. Musrin, B.Sc. - Trumpon, Desa Merdikorejo, Tempel.

Kategori Kelompok Agribisnis Hortikultura–Tanaman Buah (Perorangan)

- 3) Asosiasi Petani Krisan (APRISTA) – Hargobinangun, Pakem
Kategori Kelompok Agribisnis Hortikultura–Tanaman Hias
(Kelompok)
- 4) H. Madyo Wardoyo–Ketua KPTR Sidomakmur, Sariharjo, Ngaglik
Kategori kelompok pengembang perkebunan.
- 5) Tarminanto - Ketua P3A “ Sidomulyo “ , Bangunkerto, Turi
Kategori Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- 6) KUB Kebun Makmur - Desa Hargobinangun, Pakem.
- 7) Kelompok Wanita “ KSP KARTINI “ , Desa Hargobinangun, Pakem.
Kategori kelompok masyarakat - kelompok binaan PKK.
- 8) Kelompok Lumbung Pangan “ SEKENG RUKUN “ , Desa Trihanggo,
Gamping.
Kategori kelompok masyarakat – kelompok lumbung pangan.

Khusus untuk kategori kelompok masyarakat – kelompok binaan PKK merupakan penghargaan kelima tahun berturut-turut diperoleh wakil dari Kabupaten Sleman sejak tahun 2005. Prestasi lain di bidang ketahanan pangan tingkat Nasional , yaitu Penghargaan Peningkatan Produksi Pangan di atas 5 % yang disampaikan oleh Presiden RI pada pertengahan tahun 2009 di Boyolali, Jawa Tengah.

c. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan dan solusi bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar kelompok lumbung pangan sebagai lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat masih termasuk kategori sederhana, solusi peningkatan kegiatan pemberdayaan kelompok lumbung pangan yang lebih mengarah pada orientasi bisnis-ekonomis serta mampu berperan sebagai Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui kegiatan Dana Penguatan

Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP), Bantuan Langsung Masyarakat Sistem Tunda Jual, dan kegiatan LDPM.

- 2) Harga hasil pertanian relatif berubah-ubah karena pada komoditas tertentu waktu panen bersamaan, produksi melimpah, penanganan pasca panen belum memadai padahal produk pertanian umumnya mudah rusak, pola konsumsi yang masih tergantung beras, pemahaman nilai gizi yang rendah, dan banyaknya produk pangan instant dan awetan. Solusinya dengan penumbuhan dan pemberdayaan asosiasi pengolah hasil pertanian dan asosiasi pemasaran produk, meningkatkan kualitas produk pertanian dan mengembangkan pertanian organik serta merubah perilaku untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal serta peningkatan peran Sub Terminal Agribisnis.
- 3) Pengetahuan sebagian masyarakat tentang manajemen pemeliharaan bibit, pakan, perkandangan, kesehatan, sanitasi dan pemasaran ternak yang benar masih rendah, solusinya dengan pendampingan dan pembinaan kelompok untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang manajemen pemeliharaan ternak maupun peningkatan pelayanan pos kesehatan hewan.
- 4) Akses petani ke sumber permodalan masih rendah, solusinya dengan memfasilitasi kelompok tani untuk mendapatkan kemudahan pinjaman modal yang didukung dengan peningkatan kinerja berbagai jenis Lembaga Keuangan Mikro di wilayah pedesaan.
- 5) Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan (AB3 = Aman, Berragam, Bergizi dan Berimbang). Solusi yang dilakukan peningkatan konsumsi pangan lokal dengan dukungan Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG), penumbuhan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) serta penanganan/ intervensi daerah rawan pangan dan gizi.



14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - a) Fasilitasi dan evaluasi program pemberdayaan perempuan.
 - b) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang perekonomian bagi kelompok PKK Padukuhan.
 - c) Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan kesetaraan KB pria.
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan dan lansia
- 3) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak dengan kegiatan fasilitasi perlindungan anak

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - a) Fasilitasi dan evaluasi program pemberdayaan perempuan di 3 desa.
 - b) Pendampingan pemberdayaan perempuan di bidang perekonomian bagi PKK padukuhan di 699 Padukuhan.
 - c) Pembinaan pengurus 17 kelompok pria peduli KB bagi 515 orang.
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi perlindungan perempuan dan lansia di bidang penghapusan KDRT 1 kali.

3) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak

Fasilitasi perlindungan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 6 kali, lokakarya issue trafiking 1 kali dan forum penanganan korban KDRT 1 kali.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 99,78% dan keluaran kegiatan 95,30% yang meliputi 3 program dan 5 kegiatan. Pelaksanaan program kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjalan optimal didukung oleh sarana dan prasarana kerja, kinerja aparat, dan kesadaran masyarakat.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak. Solusinya dengan sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, fasilitasi terhadap lembaga-lembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan, serta mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Masih terdapat bias gender yang terjadi di masyarakat. Solusinya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender, menggiatkan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) kepada masyarakat.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
 - a) Fasilitasi kegiatan Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi (KR).

- b) Pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera.
 - c) Pembinaan perlindungan hak-hak Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
 - d) Pembinaan dan pengendalian program KB.
 - e) Pelaksanaan Bhakti TNI KB Terpadu.
- 2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB, KR dengan kegiatan fasilitasi peningkatan peran Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam pelaksanaan KB
- 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Keluarga
- a) Analisa dan penyajian data KB/KS.
 - b) Fasilitasi KIE melalui media cetak, elektronik dan kesenian tradisional.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

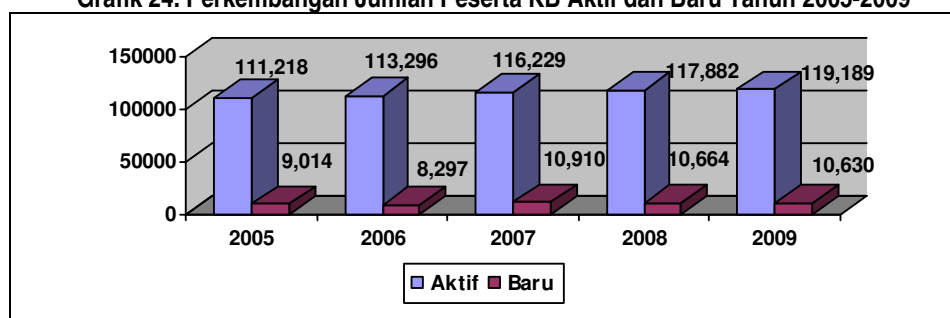
- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
- a) Pembekalan tentang perkembangan Fasilitas kegiatan keluarga berencana (KB)/kesehatan reproduksi (KR) 49 kali di tingkat kabupaten dan kecamatan serta pembinaan bagi 560 calon penganten/Pasangan Usia Subur (PUS) di 17 kecamatan.
 - b) Pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di 17 kecamatan.
 - c) Pembinaan perlindungan hak-hak KRR di 17 sekolah.
 - d) Pembinaan dan pengendalian program KB di 17 kecamatan.
 - e) Pelaksanaan Bhakti TNI KB Terpadu 1 kali.
- 2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR terealisasi fasilitasi peningkatan peran Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam pelaksanaan KB bagi 86 koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), 1.316 PPKBD, dan 7.415 sub PPKBD.

- 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Keluarga
 - a) Analisa dan penyajian data KB/KS (Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera) sejumlah 24 kali yang meliputi 17 kecamatan.
 - b) Fasilitasi KIE melalui media cetak, elektronik dan kesenian tradisional di 17 lokasi.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 97,49% dan keluaran kegiatan 100% yang meliputi 3 program dan 8 kegiatan. Pelaksanaan program kegiatan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera berjalan optimal didukung oleh sarana dan prasarana kerja, kinerja aparat, dan kesadaran masyarakat.

Program dan kegiatan di bidang KB dapat meningkatkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 1.307 peserta (meningkat 1,11%), sehingga pada tahun 2009 jumlah peserta KB aktif mencapai 119.189 peserta. Dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 149.229 pasangan maka tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 79,83%, menurun 0,16% dari tahun 2008 sebesar 79,99%. Sementara keikutsertaan pria dalam KB pada tahun 2009 sebanyak 8.338 peserta (6,99% dari peserta KB aktif). Perkembangan peserta KB aktif dan KB baru dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik 24.

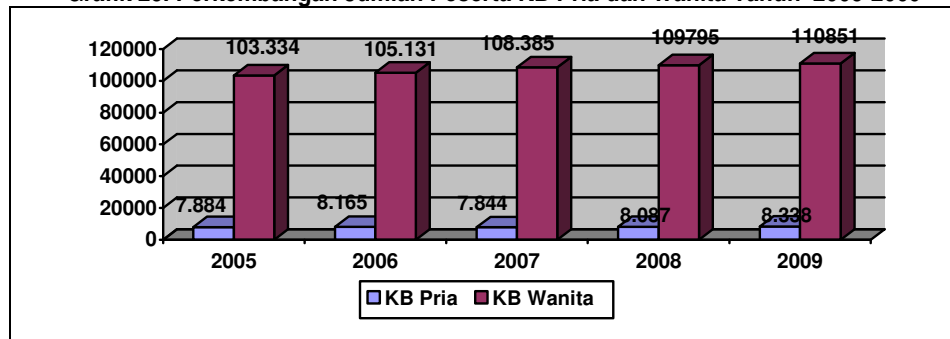
Grafik 24. Perkembangan Jumlah Peserta KB Aktif dan Baru Tahun 2005-2009



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana

Perkembangan keikutsertaan KB pria dan wanita mengalami peningkatan dari tahun 2008, jumlah KB pria 8.087 meningkat menjadi 8.338 (3,10%) dan KB wanita 109.795 meningkat menjadi 110.851 (0,96%). Perkembangan keikutsertaan KB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 25.

Grafik 25. Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria dan Wanita Tahun 2005-2009



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana

Keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, selain dilihat dari tingkat partisipasi aktif peserta KB juga dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai antara lain : Juara I Tingkat Propinsi DIY pada Kejuaraan PIK KRR oleh SMA Muh. Pakem, Juara III Tingkat Propinsi DIY pada Kejuaraan Kelompok Pria Peduli KB oleh Kelompok KB Pria Cangkringan, Juara II Tingkat Propinsi DIY pada Kejuaraan KB Perusahaan oleh PT. Mitra Adi Jaya, Juara I Tingkat Propinsi DIY pada Kejuaraan PPKBD oleh Keluarga Dwi Raharjo/Mujirah dari Padosan Pakembinangun Pakem, Juara II Tingkat Propinsi DIY pada Lomba Bina Lingkungan Keluarga oleh BLK Mulia Sari, Juara II Tingkat Nasional pada Lomba Kelompok BKB oleh BKB Flamboyan dari Dusun Bumirejo Bangunkerto Turi.

c. Permasalahan dan Solusi

Jumlah PUS sebanyak 149.229 pasangan yang mengikuti program KB belum maksimal. Solusinya dengan meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada PUS.



16. Urusan Perhubungan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - a) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - b) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - c) Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas dengan kegiatan pembinaan tertib lalulintas
- 3) Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
 - a) Operasional dan pemeliharaan terminal
 - b) Monitoring dan pengawasan angkutan lebaran dan tahun baru
 - c) Pembinaan perbengkelan
 - d) Pengelolaan perparkiran
 - e) Pemantauan emisi gas buang
 - f) Pengelolaan dan operasional pengujian kendaraan bermotor
 - g) Perawatan alat uji kendaraan
 - h) Operasional pemeriksaan kelaikan kendaraan wisata sekolah
- 4) Program Pembentukan produk hukum, penegakan hukum, dan hak asasi manusia dengan kegiatan penyusunan raperda emisi gas buang

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas terealisasi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas terdiri dari rambu 85 unit, marka jalan 1.000 m², pemasangan *flashing* 2 unit, Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) 10 unit, Modul LED untuk *traffic light* 6 unit, Battery MF 12 Volt/42 AH sebanyak 30

unit, tiang lengkung sebanyak 2 unit, *counting down timer* sebanyak 2 unit, dan rambu lalu lintas *portabel* sebanyak 40 unit.

- 2) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a) Pemeliharaan rutin LPJU 1.500 titik dan *survey* rutin LPJU di 17 kecamatan, terpasangnya LPJU baru 10 titik, dan KWH meter pada 10 kelompok LPJU.
 - b) Pemasangan LPJU baru 200 titik.
- 3) Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas melalui kegiatan pembinaan tertib lalu lintas terealisasi patroli dan pengamanan lalu lintas sebanyak 2.304 kali, penyuluhan tertib lalu lintas 800 kali, *survey* lalulintas 440 kali, tersusunnya database lalu lintas sebanyak 1 unit dan raperda tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 10 buku .
- 4) Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
 - a) Operasional dan pemeliharaan 5 terminal (Prambanan, Jombor, Condongcatur, Pakem, dan Gamping) ; pembuatan drainase pemeliharaan aspal, dan penyediaan sarana prasarana di Terminal Jombor.
 - b) Monitoring dan pengawasan angkutan lebaran dan tahun baru berupa monitoring untuk 145.500 kendaraan, peta informasi lebaran 500 lembar, dan pakaian kerja lapangan 35 buah.
 - c) Pembinaan perbengkelan untuk 75 bengkel.
 - d) Operasional 288 pengelola parkir, penerbitan 183 izin parkir, pengadaan rompi parkir 600 buah, pakaian kerja 10 buah, dan helm standar 10 buah.
 - e) Pemantauan emisi gas buang untuk 500 kendaraan.
 - f) Pengelolaan dan operasional pengujian kendaraan bermotor 18.000 kendaraan, pengadaan plat uji 36.000 keping, baut seng 750 gross, stiker uji sampling 22.000 pasang, formulir uji 450



- buku, buku uji 7.000 buku, blangko retribusi 680 buku, kartu registrasi 8.500 buku, dan pakaian kerja 28 buah.
- g) Perawatan alat uji kendaraan bermotor 9 unit.
 - h) Pengujian kendaraan wisata di sekolah untuk 300 lokasi dan 4 buah *handy talky*.
- 5) Program Pembentukan produk hukum, penegakan hukum, dan hak asasi manusia terealisasi penyusunan raperda emisi gas buang 10 buku.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan perhubungan rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 84,30% dan keluaran kegiatan 100,07% yang meliputi 5 program dan 13 kegiatan. Pelaksanaan program kegiatan urusan ini berjalan optimal didukung oleh sarana dan prasarana kerja serta kinerja aparat.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan pada tahun 2009 telah mampu meningkatkan kualitas sarana perhubungan yang terpasang menjadi lebih baik daripada tahun 2008, antara lain berupa:

- a. rambu-rambu lalu lintas sebanyak 945 buah atau meningkat 26,84%;
- b. marka jalan sepanjang 159 km atau meningkat 25,19%;
- c. APILL sebanyak 10 unit atau meningkat 50%;
- d. flasing light sebanyak 8 unit atau meningkat 166,6%;
- e. cermin tikungan sebanyak 22 atau meningkat 1000%;
- f. RPPJ sebanyak 190 unit atau meningkat 11,7%.

Sarana perhubungan seperti LPJU yang terpasang sebanyak 9.192 unit atau meningkat 0,5% dari tahun 2008. Persentase terpasangnya lampu penerang jalan pada jalan strategis dalam kondisi baik meningkat dari 88% menjadi 90%.



Persentase kendaraan yang diuji menurun sebesar 0,08% dari 18.051 kendaraan pada tahun 2008 menjadi 18.000 kendaraan pada tahun 2009, artinya hal tersebut dapat sebagai indikator bahwa kendaraan wajib uji yang beroperasi di Kabupaten Sleman telah relatif aman dan terjamin.

Pada tahun 2009 pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan telah melayani armada bus antar kota antar propinsi sebanyak 30.570 kendaraan, antar kota dalam propinsi sebanyak 101.241 kendaraan, dan angkutan pedesaan sebanyak 104.544 kendaraan, serta melayani penumpang sebanyak 2.074.941 orang.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Masih kurangnya kesadaran sopan santun masyarakat dalam berlalu lintas. Solusinya melakukan sosialisasi dan pembinaan tertib berlalu lintas kepada masyarakat.
- 2) Tidak seimbangnya fasilitas parkir yang tersedia dengan kebutuhan parkir, baik diatas badan jalan maupun diluar badan jalan, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan ketentuan tata cara parkir. Solusinya Optimalisasi kapasitas parkir yang ada, dengan melakukan pembinaan terhadap pengelola parkir mengenai tata cara parkir dan pengaturan parkir, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi perparkiran.
- 3) Masih ada pemahaman masyarakat bahwa pajak LPJU langsung dapat dinikmati dengan ketersediaan LPJU. Solusi yang ditempuh adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan Perpustakaan.



-
- b) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi
 - c) Pelayanan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan
 - f) Fasilitas rapat dan tamu, ekstra *fooding* dan makan minum rapat
 - g) Koordinasi dan konsultasi
 - h) Penyediaan jasa keamanan
 - i) Pengelolaan kepegawaian
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja
- 3) Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur :
- a) Bimbingan teknis, *workshop*, seminar, lokakarya
 - b) Peningkatan kapasitas aparatur bidang komunikasi dan informatika
- 4) Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan :
- a) Penyusunan kerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 - c) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah :
- a) Pengelolaan sistem informasi penggajian.
 - b) Pembuatan framework (kerangka kerja) pembangunan sistem informasi yang bersifat *opensources* di Sleman dan *prototype*.
- 6.) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan :
- a) Pengelolaan aplikasi sistem informasi dan perangkat lunak berlisensi
 - b) Pengelolaan internet dan intranet
 - c) Pemasangan sub PABX dan jaringan ekstension kecamatan
 - d) Pengembangan sarana prasarana pelayanan telekomunikasi



- e) Pengembangan dan pengelolaan program *interoperability grant* Pengelolaan telekomunikasi.
- f) Implementasi Paket A *Information Communication Technology* (ICT) proyek *Sustainable Capacity Building for Dezentralisation* (SCBD).
- g) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan komputer
- h) Pengelolaan dan pengembangan data center sebagai pusat data / informasi dan pusat pengelolaan jaringan komputer
- i) Pelayanan informasi berbasis SIM / call center
- j) Pengelolaan Telekomunikasi

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) pengelolaan perpustakaan, arsip, dan surat menyurat 12 bulan terdiri 119 surat masuk dan 594 surat keluar.
 - b) jasa langganan telepon, air, listrik, koran, koneksi internet frekuensi dan *transponder* serta sewa *colocation repeater sirine* di 2 tempat selama 12 bulan.
 - c) Pembayaran honorarium bendaharawan dan pembantu bendaharawan 4 orang 12 bulan
 - d) Pembayaran jasa kebersihan 3 bulan, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
 - e) Penyediaan alat tulis, barang cetakan, alat listrik, perangkot, materai dan benda pos lainnya 12 bulan
 - f) Fasilitas rapat dan tamu 12 bulan serta pemberian *extra fooding* pada 83 orang karyawan selama 12 bulan.
 - g) Koordinasi dan konsultasi 5 kali bagi 7 orang
 - h) Pembayaran 1 orang jasa keamanan kantor selama 3 bulan, 1 orang penjaga sirine peringatan dini bencana Gunung Merapi



selama 12 bulan, pengadaan 1 stel pakaian seragam satpam dan kelengkapannya.

- i) Pengelolaan kepegawaian 30 orang 12 bulan, *general check up* bagi 24 pegawai.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor terealisasi pemeliharaan sarana dan rasarana kerja alat komunikasi 119 unit, jaingan instalasi telepon 1 unit, jaringan komputer di 50 instansi, pengantian WAN/LAN di 7 lokasi, kendaraan bermotor 8 unit, gedung, dan komputer 20 unit.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) workshop, seminar, dan lokakarya ICT bagi 22 orang
 - b) Bimtek pemasangan jaringan komputer (*trouble shooting* LAN) 20 orang, bimtek pengoperasian internet 20 orang, pelatihan kataya 22 orang, pelatihan pengelola sub domain 21 orang, pelatihan bidang *e- government* dan IT 2 orang.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja, terealisasi :
 - a) Dokumen rencana kerja tahun 2010 dan dokumen RKA/DPA SKPD masing-masing 1 dokumen
 - b) Laporan pelaksanaan tugas pemerintahan 12 dokumen, LAKIP 1 dokumen, laporan tahunan SKPD 1 dokumen
 - c) Laporan keuangan dan realisasi anggaran 1 dokumen
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah terealisasi data/informasi gaji 13.300 pegawai yang *up to date* selama 12 bulan, pengelolaan aplikasi sistem informasi penggajian bagi 13.300 pegawai dari seluruh SKPD, serta tersdianya pedoman *framework* pembangunan sistem informasi yang bersifat *opensource* dan *prototype*.
- 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terealisasi :
 - a) Aplikasi sistem informasi perangkat desa 1 paket, aplikasi sistem informasi untk pencari kerja 1 paket, *software* untuk



- pemrograman desktop / delphi 1 unit yang terkelola dengan baik dan bertambahnya 2 unit lisensi *software MS office 2007*.
- b) Publikasi data up to date pelayanan email/surat warga/buku tamu secara kontinyu selama 12 bulan 307 email, *upload* berita terbaru 600 kali/berita, dan pengelolaan email 17 kecamatan selama 12 bulan.
 - c) Terpasangnya sub PABX dan jaringan ekstension kecamatan yang terdiri dari IP PABX di 11 kecamatan dan telepon ekstension 11 kecamatan.
 - d) Pengembangan sarana prasarana pelayanan telekomunikasi yang meliputi :tersandinya informasi melalui jaraingan telekomunikasi selama 12 bulan, UMPC dan *software encryption* standard 1 unit, HT *support encryption* 2 unit, *storage* 1 GB 25 unit, *modem dial up* 1 unit, sosialisasi masalah security jaringan untuk 34 pegawai di 17 kecamatan, seminar persandian 3 orang, seminar security jaringan 4 orang, pemasangan *cryptophone* dan UPS di 10 titik *sub repeater* 2 unit, ekstension VOIP di 12 kecamatan dan 18 instansi, akses poin Kepuharjo 1 unit, penarikan KU 2 unit dari Setda-Bappeda dan Kimpraswil-P3BA sepanjang 1.350 meter, rak server dan penataan jaringan telepon 400 SST di Setda, ruangan permanen dan sirine di Tritis 1 paket, *housing* kamera di kaliadem, terpasangnya card AX 100 interkoneksi di 17 kecamatan dan telematika, pemancar FM informasi darurat 1 paket dan 1 unit AC ½ Pk untuk pendingin peralatan sandi.
 - e) Pengelolaan program *interoperability grant* 1 paket, dan peningkatan pengetahuan tentang *software* GIS pada 8 pegawai
 - f) Implementasi paket A: ICT Proyek SCBD dengan penyediaan 1 set perangkat NOC yang memadai.
 - g) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktr jaringan komputer melalui pemasangan *hotspot* terintegrasi di Bappeda, BPKKD, Setwan, Setda, rumah dinas bupati, dan oproom, serta

- pemasangan perangkat BTS di 3 kecamatan dan desa Hargobinangun.
- h) Perangkat data center 1 paket dan *server* dan aplikasi sistem CPNS *online* 1 unit.
 - i) Pelayanan informasi berbasis SIM / *call center* yang meliputi pelayanan komunikasi berbasis sistem informasi selama 12 bulan, pelayanan cepat dan tepat selama 12 bulan, ruangan call center ber AC, dan peningkatan kualitas SDM bagi 7 pegawai dalam memberikan layanan pada masyarakat.
 - j) Pengelolaan dan pelayanan telekomunikasi selama 24 jam nonstop selama 12 bulan yang terdiri dari 4.910 faks dan 143.734 telepon, monitoring jaring rakom 17 kecamatan, pelayanan perbaikan telepon maksimal 3 hari dan pemeliharaan central PABX 24 jam selama 12 bulan dan bantuan kmonukasi selama 12 bulan.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 93,95% dan keluaran kegiatan 108,96% yang meliputi 6 program dan 27 kegiatan. Pelaksanaan program kegiatan urusan komunikasi dan informatika berjalan optimal didukung oleh sarana dan prasarana kerja, serta kinerja aparat yang makin meningkat.

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu meningkatkan pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman, serta penerapan *e-government* di Kabupaten Sleman. Peralatan PABX *alcatel* yang telah digunakan cukup memenuhi kebutuhan telepon di instansi. Dengan sisitem PABX komunikasi antar instansi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.



Peralatan sistem PABX yang dapat dikembangkan menjadi 500 ekstensi. Saat ini jumlah ekstensi yang terpasang sebanyak 273 ekstensi. Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah terpenuhi. Untuk selanjutnya akan dikembangkan sampai kecamatan. Saat ini telah terpasang telepon ekstensi dengan VoIP di 17 kecamatan.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan telekomunikasi, telah tersedia 4 buah *repeater* dengan frekuensi kerja yang berbeda yang dipasang di di Kaliurang. Sarana telekomunikasi tersebut digunakan untuk monitoring 17 kecamatan oleh Dinas P3BA, Dinas Pol PP dan Ketertiban Masyarakat, PMI, kecamatan dan instansi lainnya. Salah satu repeater diintegrasikan dengan jaringan telepon sehingga dapat dipakai sebagai komunikasi radio dan untuk menelepon.

Untuk memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana Merapi telah dipasang sirene tanda bencana alam yang ditempatkan di Balai Istirahat Kaliurang (BIK), Wara Kaliurang, Tritis, dan Kalitengah.

Saat ini juga telah dioperasikan mobil telekomunikasi peralatan komunikasi meliputi telepon ekstension, radio komunikasi, serta peralatan komunikasi yang akan dikembangkan sebagai alat komunikasi data. Dengan adanya peralatan komunikasi data/*voice* yang bersifat *mobile* diharapkan dapat dikembangkan sebagai sarana sosialisasi IT pada masyarakat.

Pengelolaan berita yang bersifat rahasia khususnya yang menyangkut kestabilan negara juga dilakukan dengan baik melalui persandian. Dengan ini kebocoran berita dapat diminimalisir.



Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi (dalam instansi) dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara *online*. Selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap pada Puskesmas.

Pengembangan perangkat lunak juga terus dilakukan yakni dengan pengembangan /penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows, MS Office dsb dan pengembangan aplikasi sistem informasi.

Untuk pengembangan/penambahan aplikasi sistem informasi dilakkan secara bertahap terpadu dan terintegrasi. Untuk itu telah diterapkan standarisasi jenis jenis perangkat lunak standard yang harus dipakai untuk pengembangan aplikasi. Pengembangan sistem informasi (SIM) terus dilakukan. Pada tahun 2009 telah ditambah 3 SIM yakni Sim pencari kerja, Sim Perangkat Desa dan SIM CPNS *online*. Sehingga sampai tahun 2009 telah terdapat 19 SIM , yakni :

- 1) Sistem Informasi Kepegawaian
- 2) Sistem Informasi Penggajian
- 3) Sistem Informasi Baperjakat
- 4) Sistem Informasi Dokumentasi Hukum
- 5) Sistem Informasi Perpustakaan
- 6) Sistem Informasi Aset Daerah
- 7) Sistem Informasi Layanan Industri (TDI dan IUI)
- 8) Sistem Informasi Kependudukan (SAK)
- 9) Sistem Informasi Layanan Catatan Sipil
- 10) Sistem Informasi Arsip Dinamis In-Aktif
- 11) Sistem Informasi Profil Daerah
- 12) Sistem Informasi Perizinan Pertanahan
- 13) Sistem Informasi Kesehatan
- 14) Sistem Informasi Pelatihan (BLK)



- 15) Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 16) Sistem Informasi SMS Gateway
- 17) Sistem Informasi Pencari Kerja
- 18) Sistem Informasi Perangkat Desa
- 19) Sistem Informasi CPNS on line.

Perkembangan informatika di Kabupaten Sleman telah mampu mendukung terwujudnya e-gov di Kabupaten Sleman. Portal internet www.slemankab.go.id terus dikembangkan. Saat ini *website* ini memiliki 37 sub domain yang dikelola oleh masing masing instansi. Koneksi internet berkapasitas 1.3 Mbps yang dipakai secara bersama sama oleh 250 komputer di seluruh instansi.

c. Permasalahan dan Solusi

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat kurang mampu diikuti oleh sebagian SDM. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan stakeholder dan instansi.

18. Urusan Pertanahan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Tertib Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah
 - a) Monitoring dan evaluasi tata guna tanah.
 - b) Pemanfaatan penggunaan penguasaan dan kepemilikan tanah melalui perizinan.
 - c) Penunjang LMPDP
 - d) Pengawasan/penertiban pemanfaatan tanah dan inventarisasi tanah kosong
 - e) Pemutakhiran Data, Pengukuran dan Pematokan Sultan Ground.
 - f) Pemetaan Tanah Sultan Ground
 - g) Pensertifikatan Tanah Kas Desa



-
- h) Pengadaan dan Pemasangan Patok Batas Tanah Kas Desa dan Sultan Ground
 - i) Pengendalian, Pemanfaatan, Penggunaan, Penguasaan dan pemilikan tanah (P4T) Tanah Kas Desa (TKD) dan Sultan Ground (SG)
- 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 - a) Ploting IPPT dan pembuatan lampiran peta IPPT
 - b) Pengelolaan sub domain BPPD@slemankab.go.id dan SIM Pertanahan
 - c) Penyebarluasan informasi pertanahan
 - 3) Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan
 - a) Inventarisasi peta persil tanah kas desa
 - b) Penyelesaian masalah pertanahan
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
 - d) Monitoring dan pembinaan perolehan tanah
 - 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan perpustakaan.
 - b) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi listrik, gas, air, dan media cetak.
 - c) Penyedia jasa administrasi keuangan.
 - d) Penyedia jasa kebersihan dan jaga kantor.
 - e) Penyedia alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan.
 - f) Fasilitas rapat tamu.
 - g) Koordinasi dan konsultasi.
 - h) Pengelolaan kepegawaian.
 - 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja
 - 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanahan



- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
 - a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan capaian kinerja
 - c) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran
- 8) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan kegiatan intensifikasi retribusi IPPT
- 9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Pengkajian Keputusan Bupati Nomor 53/Kep.KDH/2003.
 - b) Penyusunan rancangan kebijakan dominasi fungsi penatagunaan tanah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pertanahan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Tertib Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.
 - a) Terlaksananya monitoring dan evaluasi tata guna tanah RDTR Kawasan Tumbuh Cepat, Banyuraden dan Nogotirto RUTRK dan RDTRK Ibukota Kabupaten Sleman.
 - b) Terselaksananya permohonan IPPT sebanyak 930 pemohon dan target keputusan Bupati sebanyak 746 buah (ditolak 184) dan proses peninjauan sebanyak 95 buah.
 - c) Terlaksananya studi komparasi, metting, workshop regional, nasional dan pelatihan 3 kali, terkoreksinya peta dasar Kabupaten Sleman 376,35 kilometer dan evaluasi hasil pekerjaan konsultan IDC dari pusat.
 - d) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan tanah 79 lokasi dan inventarisasi tanah kosong di 3 kecamatan.
 - e) Terlaksananya pemutakhiran data, pengukuran dan pematokan sultan ground yang digunakan pemerintah daerah di 25 desa.



- f) Terlaksananya pemetaan tanah sultan ground di seluruh wilayah kabupaten.
 - g) Pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 200 bidang.
 - h) Terpasangnya patok batas TKD sebanyak 2500 buah dan diterbitkannya surat ukur TKD sebanyak 500 bidang.
 - i) Terbitnya rekomendasi izin pemanfaatan TKD sebanyak 30 buah dan rekomendasi izin pemanfaatan/penggunaan SG sebanyak 16 buah.
- 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- a) Tersusunnya plotting dan pembuatan peta lampiran SK IPPT sebanyak 753 buah.
 - b) Terkelolanya sub domain BPPD@slemankab.go.id dan SIM Pertanahan.
 - c) Terlaksananya pameran potensi Sleman, publikasi media radio 6 kali, leaflet 5000 lembar, profil BPPD 150 eksemplar, sosialisasi langsung kepada masyarakat di 6 kecamatan, iklan layanan masyarakat 6 paket, publikasi media cetak 3 kali, iklan media cetak 3 kali, profil audio visual 1 buah dan papan informasi 6 buah.
- 3) Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan
- a) Terlaksananya inventarisasi peta persil tanah kas desa sebanyak 1200 bidang.
 - b) terselesaikannya 16 masalah pertanahan.
 - c) Tersusunnya neraca penatagunaan tanah di 1 kecamatan, terlaksananya penyuluhan pertanahan sebanyak 23 kali, dan penelitian masalah pertanahan sebanyak 20 perkara.
 - d) Terlaksananya monitoring pemanfaatan tanah sebanyak 4 kali dan pembinaan perolehan tanah untuk 30 badan hukum.
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a) Terkelolanya jasa surat menyurat sebanyak 5.100 buah.
 - b) Tersedianya jasa langganan pemasangan instalasi listrik, gas, air, dan media cetak 12 bulan.

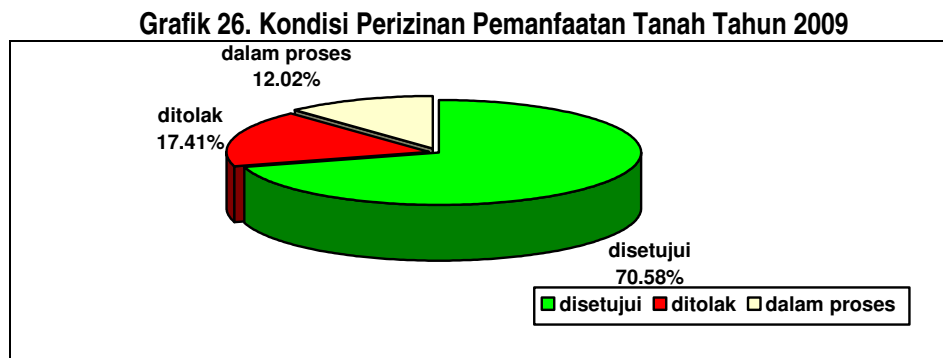


- c) Terbayarnya tunjangan bendahara dan pengurus barang 10 orang untuk 12 bulan.
- d) Terbayarnya tenaga kontrak petugas kebersihan dan jaga kantor 3 orang.
- e) Tersedianya ATK dan barang cetakan sebanyak 10 macam.
- f) Terfasilitasinya rapat dan tamu sebanyak 30 kali.
- g) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sebanyak 255 kali.
- h) Terkelolanya kepegawaian 12 bulan.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja berupa kendaraan roda dua 9 unit, roda empat 5 unit, gedung dan alat kantor
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dengan terlaksananya diskusi pertanahan dan out bound
- 7) Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
 - a) Tersusunnya RKA 1 buku, Renja SKPD 1 buku dan Program Kerja 1 buku.
 - b) Tersusunnya laporan bulanan sebanyak 12 kali, laporan tahunan 1 kali, dan LAKIP 1 buku.
 - c) Tersusunnya pelaporan keuangan dan realisasi anggaran sebanyak 12 kali dan laporan fisik dan keuangan 12 kali.
- 8) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan penyelesaian kasus tunggakan IPPT sebanyak 40 kasus
- 9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Tersusunnya draft rancangan Keputusan Bupati 1 buah.
 - b) Tersusunnya kajian akademis dan draft peraturan tentang Kebijakan Dominasi Fungsi Penggunaan Tanah 1 buah.

Berdasarkan perhitungan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pertanahan, rata-rata persentase pencapaian target pada

masukan dana sebesar 95,91% keluaran kegiatan 104,13% meliputi 9 program yang terdiri dari 32 kegiatan.

Pelaksanaan urusan pertanahan pada tahun 2009 telah berhasil diproses permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sebanyak 1.057 buah, 746 buah disetujui (70,57%), 184 buah ditolak (17,4%) dan 127 buah dalam proses (12,02%) sebagaimana digambarkan dengan grafik berikut:



Sumber: BPPD

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Ketersediaan data terus diupayakan dengan inventarisasi peta persil tanah kas desa sebanyak 1.200 bidang di Kecamatan Mlati dan penyusunan neraca penatagunaan tanah di Kecamatan Berbah. Guna kepastian status tanah yang dimanfaatkan pemerintah daerah dan tanah kas desa sampai tahun 2009 dilakukan proses sertifikasi tanah kas desa yang sebanyak 217 bidang, pemrosesan 16 rekomendasi izin pakai (kekancingan) tanah-tanah Sultan Ground, dan pemrosesan permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa 25 izin Gubernur meliputi pelepasan sebanyak 11 izin, sewa menyewa sebanyak 12 izin, dan perubahan peruntukan sebanyak 2 buah izin.



c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemilikan tanah belum optimal. Solusi yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan berupa pemberian surat peringatan serta melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam pengawasan pemanfaatan tanah.
- 2) Banyaknya pelanggaran pembangunan perumahan yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan. Solusi yang dilakukan adalah pemantauan terhadap perumahan yang telah dibangun serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan.
- 3) Banyak permohonan izin pendirian bangunan yang diajukan masyarakat setelah bangunan berdiri dan tidak sesuai dengan tata ruang maupun teknis bangunan. Solusi yang telah dilakukan adalah memberikan sanksi berupa denda berkelanjutan sampai bangunan memenuhi syarat teknis dan untuk pelanggaran tata ruang dilakukan pengkajian atas pelanggaran dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial untuk proses perizinannya.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a) Peningkatan kapasitas linmas
 - b) Operasional linmas dan kesiapsiagaan linmas
 - c) Pelatihan pengamanan Pemilu 2009
 - d) PAM Pemilu 2009
 - e) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
- 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a) Sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM
 - b) Peningkatan peran serta orkesmas (cek matrik)



- c) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik
- d) Fasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009
- e) Forum komunikasi antar partai
- f) Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik
- g) Forum Kerukunan Umat Beragama
- 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara bagi aparat dan tokoh masyarakat
 - b) Peningkatan wawasan kebangsaan
 - c) Pendataan dan pemantauan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan lembaga asing
 - d) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan bimbingan teknis korsi Pemda Sleman

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

- 1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal
 - a) Terlaksananya pembinaan Linmas tingkat Kabupaten 1 kali, pembinaan Linmas tingkat kecamatan 17 kali dan optimalisasi Rupusdalkom 12 laporan.
 - b) Terlaksananya pengerahan anggota Linmas 48 kali, karyabakti Linmas dalam rangka TMMD 2 kali, fasilitasi dan koordinasi kasatgas Linmas Desa dan Kasii Trantib Kecamatan 2 kali serta implementasi wawasan kebangsaan 8 kali.
 - c) Terlaksananya pelatihan PAM Pemilu 2009 sebanyak 4 kali.
 - d) Terlaksananya pengamanan pemilu 2009.
 - e) Terlaksananya rakor KOMINDA 12 kali dan pembinaan ketrampilan intelegen 1 kali.



-
- 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a) Terlaksananya sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM di 4 kecamatan.
 - b) Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pendataan organisasi perempuan di 2 kecamatan.
 - c) Terasilitasinya penyelenggaraan Pemilu 2009 tiga tahap.
 - d) Terlaksananya forum komunikasi antar partai 34 partai sebanyak 2 kali.
 - e) Terverifikasinya bantuan keuangan kepada partai politik 10 kali.
 - f) Terasilitasinya Forum Kerukunan Umat Beragama 1 kali.
 - 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara bagi aparat dan tokoh masyarakat di 2 kecamatan dan forum pembauran kebangsaan 2 kali.
 - b) Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan di 3 kecamatan, Deni Ceni Intelegen di wilayah rawan konflik SARA dan unjuk rasa 22 kali, monitoring dan update data OT 2 kali, serta PKBN 1 kali.
 - c) Terlaksananya pendataan dan pemantauan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan lembaga asing 21 kali.
 - d) Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 12 kali.
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan terlaksananya bimbingan teknis korsik Pemda Sleman 12 kali

Berdasarkan perhitungan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, rata-rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 94,91% dan keluaran kegiatan 96,35% meliputi 4 program yang terdiri dari 16 kegiatan.



Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten Sleman yang kondusif. Pada tahun 2009, pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu presiden wakil presiden secara langsung berjalan dengan lancar. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta aktif pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga desa sesuai kewenangannya dalam pemberian dukungan pelaksanaan pemilu.

Upaya-upaya yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjaga stabilitas dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pementapan ideologi bagi aparat dan tokoh masyarakat. Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik telah diupayakan langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan melalui forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Badan Komunitas Intelijen Daerah (BAKOMINDA). Disamping itu upaya lain yang ditempuh dengan cara deteksi dini dan cegah dini wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya SARA, pengamanan pemilihan kepala desa, penanggulangan huru hara, patroli sambang desa, pengamanan hari besar.

c. Permasalahan dan Solusi

Masih tingginya kasus-kasus tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sleman. Solusi yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat.